#bangga melayani bangsa

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN PELAKSANAAN

# FKP

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Tahun 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** **HALAMAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG ..... 1

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT ..... 2

**BAB II. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

2.1 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ..... 3

2.2 PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP ..... 3

2.3 METODE PELAKSANAAN FKP ..... 4

2.4 SUSUNAN ACARA FKP ..... 4

**BAB III. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

1. IDENTIFIKASI MASALAH ..... 5

2. ANALISIS ..... 6

3. RENCANA AKSI ..... 7

**BAB IV. PENUTUP ..... 8**

**LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI ..... 9**

**LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR ..... 13**

**LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN ..... 17**

**LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN ..... 23**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

KPU Kota Pontianak sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan tersebut, diperlukan standar pelayanan yang memberikan kejelasan mengenai ketentuan dan tata cara memperoleh layanan.

Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat, lembaga/instansi pengguna layanan serta pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, KPU Kota Pontianak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 untuk membahas enam rancangan Standar Pelayanan, meliputi pelayanan:

1. Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga/Instansi;
3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
4. Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kota Pontianak;
5. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota Pontianak;
6. Pengaduan Masyarakat.

Melalui forum ini, KPU Kota Pontianak berharap dapat memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan dan pengguna layanan agar rancangan Standar Pelayanan yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara nyata dan sesuai dengan kondisi dan kapasitas penyelenggara layanan. Sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung dengan profesional, prima, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

## 2. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh masukan dan rekomendasi dari peserta forum. Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### A. Tujuan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Memperoleh masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun;
2. Menjamin proses penyusunan Standar Pelayanan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan Publik agar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, kondisi organisasi, dan prinsip pelayanan publik yang berkualitas.

### B. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah:

1. Tersedianya masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan enam rancangan Standar Pelayanan.
2. Membangun komunikasi dan partisipasi yang konstruktif antara KPU Kota Pontianak dan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun pengguna layanan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui evaluasi dan pembenahan berkelanjutan berdasarkan hasil dari Forum Konsultasi Publik.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik KPU Kota Pontianak Tahun 2026 meliputi pembahasan enam rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan, pembahasan pada forum fokus pada substansi penyusunan rancangan Standar Pelayanan yang meliputi paparan rancangan, diskusi terstruktur, serta perumusan rekomendasi dari pemangku kepentingan dan unsur masyarakat.

# BAB II
# METODOLOGI PELAKSANAAN
# FORUM KONSULTASI PUBLIK

## 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak,
Jl. Johar No 1A, Pontianak.

Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan secara tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan prinsip partisipatif dan inklusif, serta memastikan seluruh peserta dapat memberikan masukan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

## 2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun peserta Forum Konsultasi Publik terdiri atas:

1. Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, meliputi Ketua, Anggota Divisi, dan Sekretariat;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris DPRD Kota Pontianak;
4. Bawaslu Kota Pontianak;
5. Ahli/Praktisi (Lektor Kepala FISIPOL Universitas Tanjungpura);
6. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak
7. Asosiasi media (AJI Pontianak);
8. Perwakilan pengguna layanan (Partai Politik).

Semua peserta terkecuali salah satu pengguna layanan dapat hadir dan secara aktif memberikan tanggapan pada saat pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan peserta dari berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan mencerminkan pandangan yang komprehensif dari penyelenggara, pengawas, pengguna, dan pemantau layanan publik.

## 3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik tentang penyusunan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan secara tatap muka (luring) langsung. Metode pelaksanaan ini dipilih agar proses komunikasi dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung lebih partisipatif, interaktif dan efektif antara penyelenggara dengan peserta forum. kegiatan dilakukan dalam bentuk paparan dan diskusi terbuka. Pada sesi awal, penyelenggara menyampaikan penjelasan mengenai rancangan 6 (enam) standar pelayanan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan dimaksud.

## 4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki rangkaian acara sebagai berikut:

1. Registrasi Peserta (09.00 – 09.15 WIB)
    - Peserta melakukan proses registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum kegiatan dimulai.
2. Pembukaan (09.15 – 09.30 WIB)
    - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KPU
    - Pembacaan doa
    - Sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
3. Pemaparan Draft Standar Pelayanan Informasi Publik (09.30 – 09.45 WIB)
    - Pemaparan draft 6 (enam) Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak terkait substansi dan indikator standar pelayanan.
4. Diskusi dan Rekomendasi (09.45 – 12.00 WIB)
    - Sesi tanya jawab antara peserta forum dengan penyelenggara
    - Penyampaian masukan, saran, dan rekomendasi dari stakeholder dan unsur masyarakat
    - Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk kesepakatan bersama
5. Penutupan (12.00 WIB – Selesai)
    - Kegiatan ditutup secara resmi sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian acara Forum Konsultasi Publik.

# BAB III
# HASIL PELAKSANAAN
# FORUM KONSULTASI PUBLIK

## 1. Identifikasi Masalah

Pada forum konsultasi yang telah dilaksanakan didapatkan beberapa tanggapan/masukan dari para peserta forum sebagai berikut :

| No | Nama | Instansi/ Organisasi | Tanggapan/Masukan/Saran |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabinus Matius Melano | *Stakeholder* (Komisi Informasi) | 1. *Concern* terhadap bagaimana membangun sinkronisasi terkait UU keterbukaan informasi publik, informasi dan data yang diberikan oleh badan publik maka harus ada SOP yang jelas;<br>2. Konfirmasi terkait pelayanan ini apakah benar di layani secara administratif/teknis atau hanya terkait permohonan informasi saja. |
| 2 | Yaya Maulidia | *Stakeholder* (Sekretaris DPRD Kota Pontianak) | 1. Terkait PAW pada mekanisme pelayanan perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan "dokumen pendukung";<br>2. Jumlah pelaksana pelayanan PAW harus di deskripsikan dengan jelas<br>SOP harus tersedia untuk seluruh SP bukan hanya maklumat pelayanan;<br>3. Terkait persyaratan pemutakhiran data pemilih khususnya persyaratan untuk mengisi Formulir tanggapan dan masukan masyarakat, perlu dijelaskan lebih lanjut;<br>4. terkait produk layanan, untuk konfirmasi apakah di sampaikan saat datang pertama atau seperti apa? |
| 3 | Dr. Nurfitri Nugraha | *Ahli/Praktisi* (Lektor Kepala FISIPOL UNTAN) | 1. Jenis Pengaduan seperti apa yang bisa di adukan;<br>2. Penggunaan AI untuk decision making agar dapat lebih cepat; |

| No | Nama | Instansi/ Organisasi | Tanggapan/Masukan/Saran |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Terkait evaluasi apakah evaluasi sudah terlaksana dan di tindak lanjuti, adanya forum lanjutan untuk evaluasi terkait SP yang sudah dilaksanakan?<br>4. Untuk Sosdiklih apakah persyaratan sosialisasi dapat disederhanakan, apakah ada pengajuan yang ditolak?<br>5. Terkait komptensi pelaksana dalam sosdiklih harus dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan;<br>6. Penggunaan sosmed terkait sosialisasi bagaimana menjangkau masyarakat yang tidak punya akses ke sosmed? |

Sesuai dengan masukan yang diberikan oleh peserta Forum Konsultasi Publik bersama Pemangku Kepentingan maka untuk seluruh pertanyaan telah dijawab dan dikonfirmasi dengan baik oleh pihak penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hal-hal yang masih dapat dioptimalisasi maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelayanan pada standar pelayanan PAW masih belum dideskripsikan dengan jelas;
2. Jenis pengaduan pada pelayanan Pengaduan Masyarakat perlu dirincikan lebih lanjut untuk pengaduan apa saja yang bisa dilayani;
3. Jumlah pelaksana untuk pelayanan PAW dapat disebutkan secara spesifik;
4. Kualifikasi pendidikan pelaksana untuk layanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih belum dicantumkan.

**2. Analisis**

Terdapat beberapa aspek dalam rancangan Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak yang masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya aspek:

1) Kejelasan jangka waktu pelayanan;
2) Rincian jenis pengaduan yang dapat dilayani;
3) Kejelasan jumlah pelaksana;
4) Serta pencantuman kualifikasi pendidikan pelaksana pada layanan terkait.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rancangan Standar Pelayanan perlu disusun secara lebih jelas dan terperinci, baik dari sisi informasi yang disampaikan kepada pengguna layanan maupun dari sisi kesiapan pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan. KPU Kota Pontianak memahami bahwa kejelasan mengenai jangka waktu dan ruang lingkup layanan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, sedangkan pencantuman jumlah dan kualifikasi pelaksana diperlukan untuk memperjelas dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap rancangan Standar Pelayanan berdasarkan masukan yang diperoleh dalam forum, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, tugas dan kewenangan KPU Kota Pontianak, serta kondisi sumber daya yang tersedia. Hasil penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan yang lebih jelas bagi penyelenggara maupun pengguna layanan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

## 3. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

| No | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan | Jangka Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Jangka waktu pelayanan PAW pada Standar Pelayanan belum jelas | Jangka waktu pelayanan PAW pada Standar Pelayanan diklasifikasikan untuk jenis situasi tertentu dan diberikan penjelasan setiap klasifikasi jangka waktunya | 1 Hari |
| 2 | Jenis pengaduan pada pelayanan Pengaduan Masyarakat perlu dijelaskan lebih lanjut untuk pengaduan apa saja yang bisa dilayani | Jenis-jenis pengaduan dapat disosialisasikan lebih lanjut melalui sosial media. | 3 Hari |
| 3 | Jumlah pelaksana untuk pelayanan PAW dapat dijelaskan dengan rinci | Deskripsi Standar Pelayanan dapat dilengkapi dengan jumlah secara spesifik | 1 Hari |
| 4 | Kualifikasi pendidikan pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih belum jelas | Standar Pelayanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dapat dilengkapi dengan kualifikasi pelaksana | 1 Hari |

# BAB IV
# PENUTUP

Atas terlaksananya Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, maka segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti masukan, saran, serta rekomendasi konstruktif dari peserta forum.

Harapan kami hasil dari forum ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan kedepannya sehingga peningkatan terhadap pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pontianak, 14 Oktober 2026

Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT

Eka Sulastri

# LAMPIRAN I
# BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

BERITA ACARA
NOMOR 32/ORT.08-BA/6171/3/2026
TENTANG
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Jalan Johar No. 1A Pontianak, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang membahas Standar Pelayanan:

1. Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga/Instansi;
3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
4. Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kota Pontianak;
5. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota Pontianak;
6. Pengaduan Masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi dan menjadi keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

| No | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan | Jangka Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Jangka waktu pelayanan PAW pada Standar Pelayanan belum jelas | Jangka waktu pelayanan PAW pada Standar Pelayanan diklasifikasikan untuk jenis situasi tertentu dan diberikan penjelasan setiap klasifikasi jangka waktunya | 1 Hari |

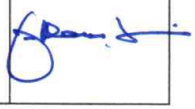
| No | Identifikasi Masalah | Usulan Rekomendasi Perbaikan | Jangka Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 2 | Jenis pengaduan pada pelayanan Pengaduan Masyarakat perlu dijelaskan lebih lanjut untuk pengaduan apa saja yang bisa dilayani | Jenis-jenis pengaduan dapat disosialisasikan lebih lanjut melalui sosial media | 3 Hari |
| 3 | Jumlah pelaksana untuk pelayanan PAW dapat dijelaskan dengan rinci | Deskripsi Standar Pelayanan dapat dilengkapi dengan jumlah secara spesifik | 1 Hari |
| 4 | Kualifikasi pendidikan pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih belum jelas | Standar Pelayanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dapat dilengkapi dengan kualifikasi pelaksana | 1 Hari |

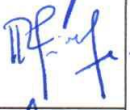
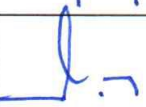
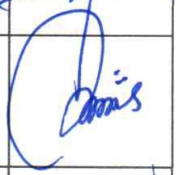
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengguna layanan dan pemangku kepentingan yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pontianak, 14 Oktober 2026

| No | Nama | No Hp | Jenis Kelamin (L/P) | Perwakilan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabinus Matius Melano | 081256598836 | L | *Stakeholder* (Komisi Informasi) |  |
| 2 | Yaya Maulidia | 081253749986 | P | *Stakeholder* (Sekretaris DPRD Kota Pontianak) |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AH. Muzammil | 082154039126 | L | *Stakeholder* (Bawaslu) |  |
| 4 | Dr. Nurfitri N | 08125772494 | P | *Ahli/Praktisi* (Akademisi) FISIPOL UNTAN |  |
| 5 | Abdul Syukur | 081345547799 | L | *Organisasi Masyarakat* (FKUB Pontianak) |  |
| 6 | Bagoes S | 085754574243 | L | *Media Massa* (AJI Pontianak) |  |
| 7 | Burhanuddin | 081256432234 | L | *Pengguna Layanan* (PDIP) |  |
| 8 | Nuki Marlina | 0895600388646 | P | *Pengguna Layanan* (GERINDRA) |  |
| 9 | Dedet Gunawan | 082110803287 | L | *Pengguna Layanan* (GOLKAR) |  |
| 10 | Rizal Erdani | 085721571111 | L | *Pengguna Layanan* (NASDEM) |  |
| 11 | Ridho | 089693786016 | L | *Pengguna Layanan* (PKS) |  |
| 12 | Agus | 081345401494 | L | *Pengguna Layanan* (DEMOKRAT) |  |
| 13 | Darmayasari | 083814740002 | P | *Pengguna Layanan* (PPP) |  |
| 14 | Andhika Permana | 08125621843 | L | *Pengguna Layanan* (PKB) |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Yusuf M. | 087865057442 | L | *Pengguna Layanan* (PAN) | |

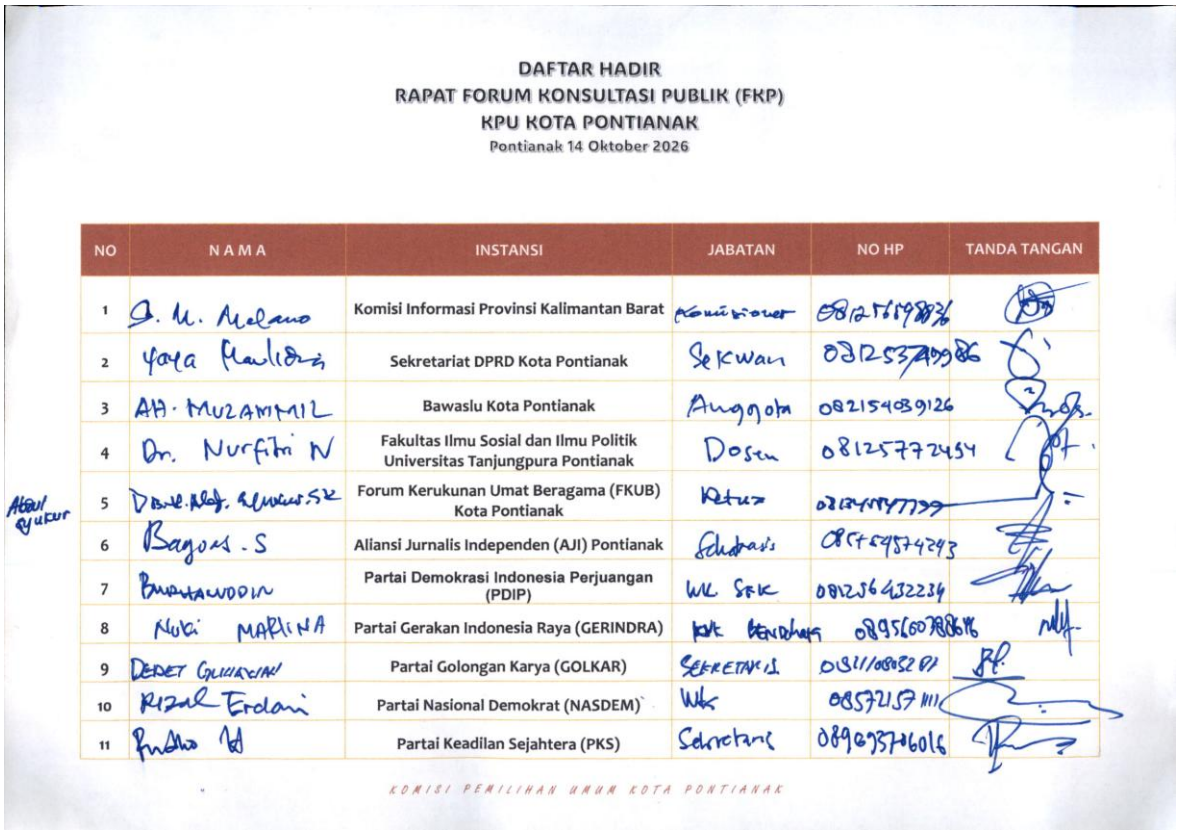
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak

Eka Sulastri

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak

David Teguh

# LAMPIRAN II
# SALINAN DAFTAR HADIR

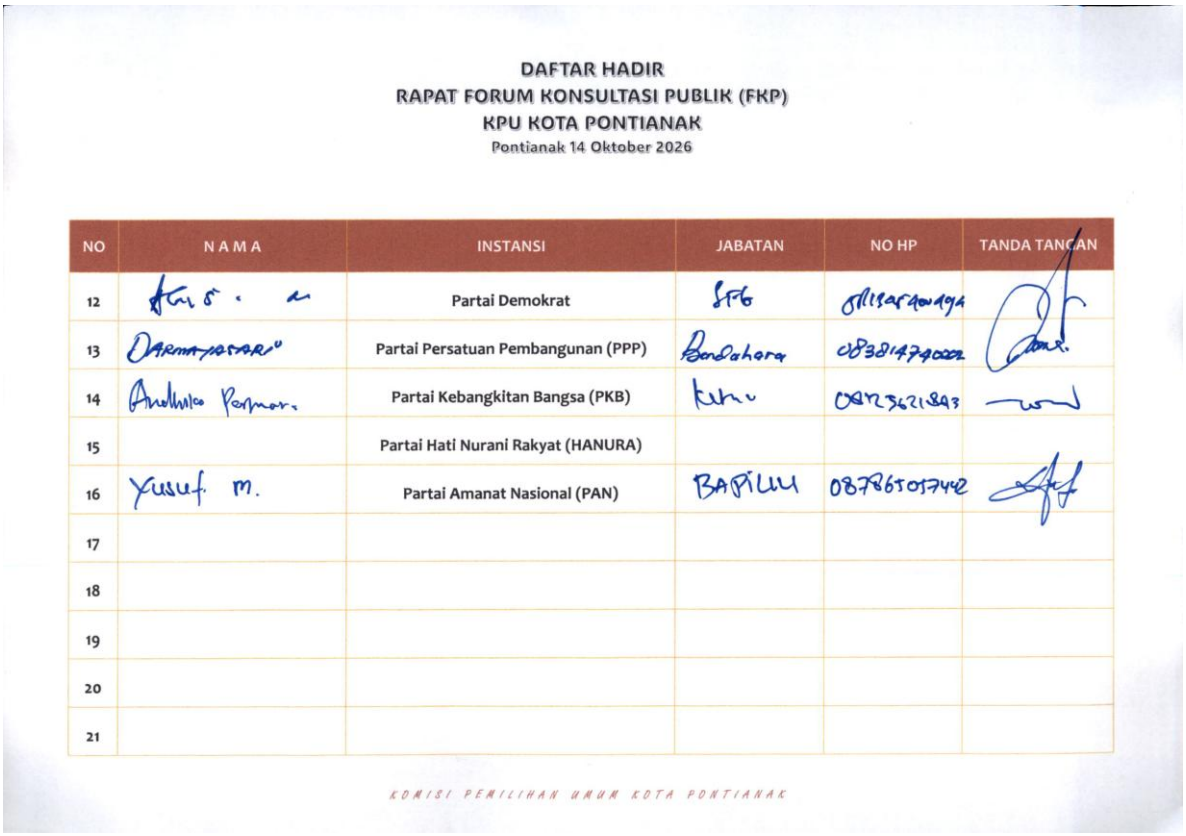


DAFTAR HADIR
RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KOTA PONTIANAK
Pontianak 14 Oktober 2026

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | NO HP | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. M. Melano | Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat | Komisioner | 08125[illegible] | |
| 2 | Yaya Hanlibra | Sekretariat DPRD Kota Pontianak | Sekwan | 0812537[illegible] | |
| 3 | AH. MUZAMMIL | Bawaslu Kota Pontianak | Anggota | 082154039126 | |
| 4 | Dr. Nurfitri N | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak | Dosen | 081257724S4 | |
| 5 | [illegible] | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak | Ketua | 0[illegible] | |
| 6 | Bagoes . S | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak | Sekretaris | 085749574293 | |
| 7 | Buhtaruddin | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Wk Sek | 081256432234 | |
| 8 | Nuki MARLINA | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Ketua Bendahara | 0895603[illegible] | |
| 9 | DEDET GUNAWAN | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | SEKRETARIS | 0811/08082 01 | |
| 10 | RIZAL Erdani | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Wk | 085721571111 | |
| 11 | [illegible] | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Sekretaris | 089693706016 | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Akbar Qurtubi



DAFTAR HADIR
RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KOTA PONTIANAK
Pontianak 14 Oktober 2026

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | NO HP | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | [illegible] | Partai Demokrat | SPG | 0[illegible] | |
| 13 | [illegible] | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Bendahara | 0838147[illegible] | |
| 14 | Abdullah Parmar. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Ketua | 0852362[illegible] | |
| 15 | | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | | | |
| 16 | Yusuf M. | Partai Amanat Nasional (PAN) | BAPILU | 0878650[illegible] | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

**DAFTAR HADIR**
**RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**
**KPU KOTA PONTIANAK**
Pontianak 14 Oktober 2026

| NO | N A M A | INSTANSI | JABATAN | NO HP | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Azmi | Magang Komisi Informasi | | | |
| 2 | IQBAL | – | | | |
| 3 | HANAN ARYA I.P | POCREETA | | | |
| 4 | AE. WAHYUDI | Resta | Kasub | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

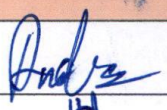
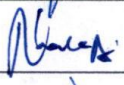
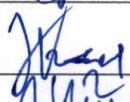
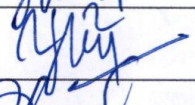
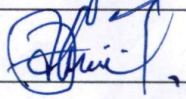
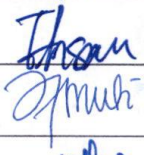
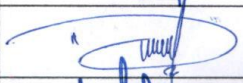
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Alamat: Jl. Johar No. 1A-78111 Pontianak
Telp. (0561) 740021 Email: Kota_Pontianak@kpu.go.id

## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Aula KPU Kota Pontianak
Agenda : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak (FKP)

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID TEGUH M | Ketua | |
| 2 | ABDUL HARIS | Anggota | |
| 3 | BENNING RIZAHRA | Anggota | |
| 4 | KHAIRUL UMAM | Anggota | |
| 5 | RACHMATUL FITRAH | Anggota | |
| 6 | EKA SULASTRI | Sekretaris | |
| 7 | IRA LISTIANI | Fungsional | |
| 8 | NURAINI | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | |
| 9 | RIKA KASTIANI | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 10 | DELASEPTA DWI HASTRI | Kasubbag KUL | |
| 11 | SYARIFAH ALIFIAH | Kasubbag TPP dan Parhumas | |
| 12 | M. SADIKIN | Fungsional | |
| 13 | FEDY PEBRILIAN | Fungsional | |
| 14 | RACHMAWATI | Fungsional | |
| 15 | UM. RIDWAN | Fungsional | |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|---|---|---|
| 16 | ANDRY PERMANA | Fungsional |  |
| 17 | KADEK SUYANDYANA | Fungsional |  |
| 18 | ERADON SONATA | Fungsional |  |
| 19 | MUHAMMAD RUSYDI | Pelaksana |  |
| 20 | NINA NOVIANA | Pelaksana |  |
| 21 | AGUS PRIHARTONO | Pelaksana |  |
| 22 | FITA KUMALA PAWESTRI | Pelaksana |  |
| 23 | MUHAMMAD ISNU FAHRURROZI | Pelaksana |  |
| 24 | FAHREZA APRIYOGA ARIZAL | Pelaksana |  |
| 25 | IVAN JETRO MANIK | Pelaksana |  |
| 26 | YAHYA RISQI | Pelaksana |  |
| 27 | KHAIRUR RIJAL | Pelaksana |  |
| 28 | ILHAM KURNIAWAN | Pelaksana | — |
| 29 | HERDYANSYAH NUR NUSANTARA | Pelaksana | — |
| 30 | IHSANUDDIN | Pelaksana |  |
| 31 | ICHSAN RIDHO | Pelaksana |  |
| 32 | MUTIARA REGINNA PUTRI | Tenaga Administrasi |  |
| 33 | MOHAMMAD DICKY | Tenaga Administrasi |  |
| 34 | DESI FITRIANI | Tenaga Administrasi |  |
| 35 | LUTHFI ALDI NURVIANDI | Tenaga Administrasi |  |
| 36 | M.FADHUL BARKAH | Tenaga Administrasi |  |

# LAMPIRAN III
# SURAT UNDANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Nomor : 90/ORT.08.1-Und/6171/3/2026 Pontianak, 8 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)
di
Pontianak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kota Pontianak serta mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka KPU Kota Pontianak bermaksud melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. KPU Kota Pontianak akan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan unsur kemasyarakatan, akademisi, partai politik, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
2. Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan untuk memperoleh saran, masukan, tanggapan dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak.
3. Standar Pelayanan yang menjadi bahan pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik meliputi layanan:
   1) Pemutakhiran Data Pemilih;
   2) Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga/Instansi;
   3) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
   4) Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kota Pontianak;
   5) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota Pontianak;
   6) Pengaduan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu atau perwakilan yang ditunjuk untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

   Hari/Tanggal : Rabu/14 Oktober 2026
   Pukul : 09.00 WIB - selesai
   Tempat : Aula Kantor KPU Kota Pontianak
   Jl. Johar No. 1A Pontianak.

5. Materi 6 (enam) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diunduh melalui tautan *https://tinyurl.com/sp-kpuptk2026.*
6. Mengingat keterbatasan kapasitas tempat, setiap instansi/lembaga/organisasi diharapkan diwakili oleh 1 (satu) orang peserta.
7. Konfirmasi kehadiran agar dapat disampaikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 melalui tautan *https://tinyurl.com/sp-konfirm-kehadiran.*

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua,



David Teguh M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Ketua KPU Kota Pontianak
Nomor : 90/ORT.08.1-Und/6171/3/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026

Daftar Undangan

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sekretaris DPRD Kota Pontianak;
3. Ketua Bawaslu Kota Pontianak;
4. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak;
5. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Pontianak;
6. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tingkat Kota Pontianak;
7. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Tingkat Kota Pontianak;
8. Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tingkat Kota Pontianak;
9. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tingkat Kota Pontianak;
10. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Kota Pontianak;
11. Ketua Partai Demokrat Tingkat Kota Pontianak;
12. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tingkat Kota Pontianak;
13. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tingkat Kota Pontianak;
14. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Tingkat Kota Pontianak;
15. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Tingkat Kota Pontianak.

Ketua,

David Teguh M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Nomor : 93/ORT.08.1-Und/6171/3/2026 Pontianak,9 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik
Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak

Yth. Ibu Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si.
di
Pontianak

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kota Pontianak serta mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka KPU Kota Pontianak bermaksud melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. KPU Kota Pontianak akan melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan unsur kemasyarakatan, akademisi, partai politik, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
2. Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan untuk memperoleh saran, masukan, tanggapan dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak.
3. Standar Pelayanan yang menjadi bahan pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik meliputi layanan:
    1) Pemutakhiran Data Pemilih;
    2) Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga/Instansi;
    3) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
    4) Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kota Pontianak;
    5) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kota Pontianak;
    6) Pengaduan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut kami mengharapkan kehadiran Ibu untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

   Hari/Tanggal : Rabu/14 Oktober 2026
   Pukul : 09.00 WIB - selesai
   Tempat : Aula Kantor KPU Kota Pontianak
   Jl. Johar No. 1A Pontianak.

5. Materi 6 (enam) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diunduh melalui tautan *https://tinyurl.com/sp-kpuptk2026.*
6. Konfirmasi kehadiran agar dapat disampaikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 melalui tautan *https://tinyurl.com/sp-konfirm-kehadiran.*

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Ketua,

David Teguh M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Nomor : 91/ORT.08.1-Und/6171/3/2026 Pontianak, 8 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. 1. Anggota KPU Kota Pontianak
2. Sekretaris KPU Kota Pontianak
3. Pejabat Fungsional KPU Kota Pontianak
4. Kasubbag KPU Kota Pontianak
5. Pelaksana KPU Kota Pontianak
6. PPNPN KPU Kota Pontianak

di -
Pontianak

Dalam rangka pelaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 terkait penyusunan 6 (enam) Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak, diharapkan Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Rabu/14 Oktober 2026
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Kantor KPU Kota Pontianak
Jl. Johar No. 1A Pontianak

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua,

David Teguh M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# LAMPIRAN IV
# DOKUMENTASI KEGIATAN



















Forum Konsultasi Publik